

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan Dalam: Masalah-Masalah Hukum*. FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. PT Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 2005.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2010.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkebangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. PT Kencana, Jakarta. 2010.
- Hartono Hasoeprapto. *Pengaturan Tata Hukum Indonesia Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Salim dan Erlies Seotiana Nurhaini HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Satochid Karta Negara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Akademik 2004/2005*. Fakultas Hukum UNJA. Jambi. 2004.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

B. Disertasi/Jurnal

- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 22 Januari 2022.

Hafrida, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 16, Nomor 1, ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014.

Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>, tanggal akses 22 Januari 2022.

Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009), diakses melalui <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/52>, tanggal akses 22 Januari 2022.

Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, diakses melalui <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0701fb73000fce15bd/medias-i-penal-di-indonesia>, tanggal akses 22 Januari 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 251. TLNRI Nomor 5952.

D. Internet

Qigipoy, *Di Indonesia, Kasus Penipuan Dominasi Kejahatan "Cyber"*, Ubsi Cyber.com, diakses tanggal 29 Januari 2022.